

Penerapan perlindungan konsumen nasabah dengan pembiayaan KPR = The implementation of customer protection in associated with house ownership credit

Purba, Peony Tarida Uli, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20415028&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab masih adanya hambatan dalam upaya mencapai tujuan tersebut, salah satu diantaranya adalah masalah perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah.

Dalam rangka pemerataan pembangunan perumahan, Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta dalam mengembangkan perumahan yang layak, sehat, aman, dan serasi, baik secara tunai maupun melalui fasilitas kredit pemilikan rumah, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Untuk menarik minat masyarakat, pengembang memasarkan produknya melalui berbagai media, salah satunya adalah melalui brosur perumahan. Informasi yang diterbitkan pengembang dalam bentuk brosur begitu tendensiusnya, sehingga tidak jarang menyesatkan (misleading information) dan merugikan konsumen.

Tahap akhir dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah dirasakan sangat jauh dari harapan konsumen untuk mendapatkan hak-haknya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 4 Undang- undang Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999), sarana dan prasarana yang tidak memadai, aparat yang kurang, serta belum dibentuknya lembaga yang menerima pengaduan maupun penyelesaian sengketa konsumen seperti yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen, sedangkan kendala yang ditemukan adalah faktor yang berasal dari diri konsumen sendiri seperti faktor sosial budaya, pendidikan, tingkat ekonomi serta kekuatan tawar menawar konsumen ketika berhadapan dengan produsen. Faktor dari luar konsumen seperti faktor hukumnya walaupun secara normatif UU Perlindungan Konsumen telah berlaku, namun agaknya belum tampak lembaga yang representatif yang memperjuangkan hak-hak konsumen dan tidak adanya aparat yang peduli terhadap kondisi dan posisi konsumen yang lemah kedudukannya daripada pengembang.

.....One of the goals establishment of Republic of Indonesia is to protect all Indonesian people and to move all general welfare forward based on Pancasila. To attain the goal, seriousness is needed either by government or all levels Indonesian people because there are obstacle in the effort of them is the protection concern on consumers in the agreement of house-owned credit.

In order to distribute the housing development, the Governments offers confidence to private parties in developing the proper, healthy, safe, and harmonious dwelling and housing, either by cash or facility of house-owned credit, consistent with the mandate of Article 5 section (1) of the Act 1992, Number 4 on Dwelling and Housing.

To attract publics interest, developers market their product through a variety of media, one of them is by brochures about housing. Information published by developers in the form of housing brochures is do

tendentious, so that they sometimes provide misleading information and make consumers disadvantageous. The final stage of study concludes that the law protection for consumers in the agreement of house-owned credit is supposed to be very far from the consumers expectation to get their rights as mandate by Article 4 of Consumer Protection Act (Act 1999 Number 8). This can be seen because of the absence of regulation particularly protecting the housing consumers of house owned-credit, inappropriate structure and infrastructure, less apparatus, and institutions receiving or settlement of consumer dispute as mandated by Consumer Protection Act whereas obstacles found are factors derived from the consumers themselves like conditions of social-culture, education, economic level, and bargaining power of the consumer when dealing with the producers. External factors such as legal factor, despite normatively the Consumer Protection Act put into effect, a representative institution would not presumably appear to struggle for consumer rights and no apparatus who have concern on weaker condition and position of consumer than the developers, Role of Local Government, provides assurance of rights and protection for house-owned credit consumers by giving permit and supervision to the developers periodically carried out.